

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Pangkalan Kasai

Beni Faturrahman¹ Raden Imam Al Hafis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.

benifaturrahman@student.uir.ac.id radenimamalhafiz@soc.uir.ac.id

Received : 13 Juni 2025

Abstract

This research is motivated by various public complaints about the quality of public services in Pangkalan Kasai Village, Indragiri Hulu Regency, such as the slow process of issuing Land Certificates (SKT), fees being charged for processing Poverty Certificates (SKTM), and lack of information transparency from the village administration. These conditions indicate that the principles of Good Governance have not been optimally implemented in public services at the village level. The issues examined in this research are how the principles of Good Governance are applied in public services in Pangkalan Kasai Village and what are the supporting and inhibiting factors. This research uses the Good Governance theory proposed by the United Nations Development Programme (UNDP, 1997), which includes eight indicators: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, and accountability. However, the researcher limited the focus to five main indicators considered most relevant in the context of public services at the village level, namely: transparency, accountability, responsiveness, effectiveness and efficiency, and equality and inclusiveness. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of village officials and residents who use the services. The results of this research indicate that the principles of transparency and accountability are still not optimal, characterized by unclear procedures, limited access to information, frequent delays in document completion, and problems with staff time discipline..

Key Words : *The Application, Good Governance Principles, Public Service*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu, seperti lambatnya proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), adanya pungutan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta kurangnya keterbukaan informasi dari pihak kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* belum diterapkan secara optimal dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kelurahan Pangkalan Kasai dan apa saja faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 1997), yang mencakup delapan indikator: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Namun, peneliti membatasi fokus pada lima indikator utama yang dianggap paling relevan dalam konteks pelayanan publik di kelurahan, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta kesetaraan dan inklusivitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur kelurahan dan warga yang menggunakan layanan.

Kata kunci : *Penerapan, Prinsip-prinsip Good Governance, Pelayanan Publik.*

Pendahuluan

Good Governance, mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Yaitu pada saat jatuhnya nya pemerintahan Orde Baru yang berganti ke Era Reformasi pada tahun 1998. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul, tuntutan pemerintah orde baru yaitu Presiden sebagai pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang

tidak berjalan dengan baik, dan juga tidak berjalannya Kontrol sosial yang berasal dari partisipasi masyarakat, menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 tentang Pemerintahan yang baik yang berisi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pemerintahan yang bersih sangat diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan tentu saja *Good Governance* sudah menjadi tanggung Dalam bidang *Good Governance*, prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keterlibatan publik, kepastian hukum dan kesamaan hak merupakan pilar dasar yang harus dicontohkan setiap negara.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjamin bahwa instansi pemerintah dapat diakses dan dapat diawasi oleh masyarakat, terlebih lagi dalam membuat keputusan yang mencerminkan kepentingan publik yang menyeluruh.

Tanggung jawab bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan pemerintahannya, tuntutan reformasi itu mengharuskan terjadinya perubahan pada sistem pemerintahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik dengan membuat sebuah aturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya membahas tentang desentralisasi atau pelimpahan kewenangan untuk memberikan layanan dan lain sebagainya, selanjutnya menanggapi

berbagai macam layanan yang terjadi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian pada tahun 2014 terjadi lagi perubahan berkaitan Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 yang diubah dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tadi, dan terjadi lagi perubahan pada Tahun 2015 menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang diubahnya ketentuan Ayat (1) pasal 63 Tentang Kepala Daerah, penambahan wewenang DPRD Provinsi dan penambahan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.

Good Governance sudah diupayakan di Provinsi Riau yang dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelayanan publik peraturan tersebut yang menekankan Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi bagian dari Provinsi Riau yang mana sudah melakukan upaya dalam menerapkan *Good governance* di Kabupaten Indragiri Hulu dengan merbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 76. Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hulu dan juga Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Tahun 2020-2024. Peraturan ini dibuat menimbang bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kelurahan Pangkalan Kasai yang menjadi salah satu daerah kelurahan di bawah yuridiksi Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terdiri dari 48 RT dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kecamatan Seberida tahun 2024 dengan jumlah lelaki sebanyak 10.316 dan jumlah perempuan 9.745 dengan total 20.061 jiwa yang terdata, dan menjadikan Kantor Lurah Pangkalan Kasai sebagai objek penelitian dalam aspek pelayanan publik.

Pemilihan lokasi ini didasari adanya indikasi permasalahan mengenai proses layanan pembuatan SKT dan SKTM yang saat ini sedang mengemuka di Kelurahan Pangkalan kasai, Dari hasil pengamatan sementara, penulis menemukan adanya indikasi permasalahan dalam

proses pelayanan di Kelurahan Pangkalan Kasai yang berasal dari laporan masyarakat, adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Bahwa dibebankannya biaya dalam pembuatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), sedangkan dalam ketentuan standar operasional prosedur di Kantor Lurah Kelurahan Pangkalan Kasai, pembuatan SKTM tidak dibebankan biaya. Selain itu, terdapat indikasi adanya perbedaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan, di mana pemohon dalam pembuatan SKTM cenderung menerima perlakuan yang kurang baik dibandingkan dengan pelayanan lainnya.
2. Adanya permasalahan waktu penyelesaian kepengurusan dokumen SKT yang dikeluhkan lama dalam proses penerbitannya 30-45 hari, sedangkan di dalam ketentuan standar operasional prosedur di Kantor Lurah Kelurahan Pangkalan Kasai penerbitan SKT hanya 14 hari setelah semua prosedur diselesaikan oleh pemohon.
3. Permasalahan tidak transparannya pihak penyelenggara pelayanan terhadap prosedur pelayanan di kantor Lurah Kelurahan Pangkalan Kasai, sehingga masyarakat harus bolak-balik dalam mengurus berkas untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu sistem dari suatu kegiatan formal yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar sub sistem atau bagian yang satu dengan sub sistem atau bagian sesuatu lainnya (Nurman, 2023). Siagian (Nurman, 2023) mengemukakan bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber sumberdaya sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik (Muhammad, 2019).

Konsep Organisasi

Robbins (2002) Pengertian organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Chester I Bernard (Jaelani, 2021) Mengemukakan Organisasi adalah sistem aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang Sedangkan (Siagian, 1992) Mengemukakan Organisasi adalah setiap bentuk kolaborasi antara dua atau lebih orang yang terkait secara formal dan bekerja sama untuk melakukan pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan dalam hubungan antara seseorang atau lebih yang dikenal sebagai atasan dan bawahan.

Konsep Manajemen

Menurut Mary Parker Follett (Krisnandy, 2019) disebutkan bahwa management is the art of getting thing done through people. Artinya, manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan.

Nurman (2023) Manajemen (*Manage*) yang berarti mengurus, mengelola, menanggulangi, menyelesaikan, menata, merapikan, merampungkan dan memperbaiki sumberdaya organisasi, Sementara itu Stoner (1996) dalam (Krisnandy, 2019) menyebutkan bahwa manajemen adalah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan.

Konsep Pelayanan Publik

(Andry & Tarmizi, 2020) Pelayanan publik adalah semua kegiatan nya harus dijamin pemenuhan nya diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena itu diperlukan perwujudan dan perkembangan saling saling ketergantungan sosial dan pada hakikat nya, perwujudan nya sulit terlaksanan tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan

B.Libois (Andry & Tarmizi, 2020) Pelayanan publik merupakan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan dan kegiatan atau pelayanan dengan menghindari logika milik pribadi atau swasta karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan.

Konsep Birokrasi

Almond dan Powel (Andry & Tarmizi, 2020) birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal(role makers), sedangkan Batinggi dalam (Andry & Tarmizi, 2020) mengartikan birokrasi sebagai tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas tugas administratif yang besar dengan cara mengkordinir secara sistematis dan (teratur) pekerjaan banyak orang.

Konsep Good Governace

Karakteristik *Good Governance* sebagaimana dijelaskan *United Nation Development Program* (UNDP) Sedarmayanti (2003), menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan pelaksanaan sistematis otoritas negara dalam pengiriman barang dan jasa publik, sebuah fenomena yang disebut sebagai tata kelola, dengan praktik teladan yang dilambangkan sebagai *Good Governance*. Agar *Good Governance* dapat diterapkan secara efektif dan berfungsi secara optimal, diperlukan dedikasi dan partisipasi semua pemangku kepentingan, baik entitas pemerintah maupun masyarakat sipil.

Sementara itu UNDP (*United Nation Development Program*) dalam (Dwiyanto, 2006) mengemukakan delapan Prinsip *Good Governance* :

- a. Partisipasi, Keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan inisiatif kebijakan publik.

Beni Faturrahman dan Raden Imam Al Hafis

- b. Transparansi, Kualitas keterbukaan dalam pelaksanaan layanan publik, dimana individu dapat dengan mudah mengakses informasi terkait.
- c. Akuntabilitas, Tugas untuk memberikan pertanggung jawaban untuk pengelolaan dan pengawasan sumber daya yang dialokasikan untuk layanan publik.
- d. Efektif dan Efisien, Layanan yang menghasilkan hasil yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sambil memanfaatkan sumber daya secara optimal.
- e. Aturan Hukum, Administrasi layanan publik didasarkan pada peraturan yang eksplisit dan ditegakkan secara adil.
- f. Responsivitas, Kapasitas organisasi untuk membedakan dan memenuhi persyaratan masyarakat.
- g. Berorientasi Konsensus, Proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan beragam kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang paling menguntungkan.
- h. Kesetaraan dan Inklusivitas, Layanan yang menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama bagi semua komunitas, bebas dari diskriminasi.

Dari konsep di atas, dapat diketahui bahwa *Good Governance* adalah upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, *Good Governance* juga bertujuan untuk memastikan ketercapaian target dengan pengelolaan sumber daya yang minim, serta memastikan semua orang memiliki hak yang sama, mendapatkan pelayanan yang adil, dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi perumusan masalah penelitian dan untuk memenuhi tujuan menyeluruh dari penelitian ini, dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli peneliti menggunakan pandangan dari lembaga *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) untuk menganalisa masalah penelitian ini dikarenakan pandangan UNDP menyediakan pandangan komprehensif. Dari delapan prinsip yang dikemukakan lembaga *United Nation Development program* peneliti menggunakan lima indikator dalam mengukur permasalahan dalam pelayanan yang mengemuka belakangan ini di Kelurahan Pangkalan Kasai dalam hal pelayanan, yaitu :

- a. Transparansi.
- b. Akuntabilitas.
- c. Responsivitas.
- d. Efektivitas dan efisien.
- e. Kesetaraan dan Inklusivitas

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya. (Riantika, 2020).

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data penelitian ini mengacu pada

Mathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael Huberman ahli pendidikan dari *University of Geneva, Switzerland*, (Miles dan Huberman, 1992) analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka (Elia & Dkk, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pangkalan Kasai menunjukkan beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan teori yang diajukan oleh *United National Development Program* (UNDP, 1997). Teori UNDP menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang baik, yang memungkinkan warga untuk mengekspresikan kepentingan mereka dan melaksanakan hak-hak hukum. Namun, di Kelurahan Pangkalan Kasai, prosedur pelayanan tidak sepenuhnya tersosialisasi, mengakibatkan warga tidak mengetahui syarat yang diperlukan dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi kelurahan.

Di sisi lain, responsivitas, efektivitas, dan kesetaraan dalam pelayanan menunjukkan kemajuan, di mana petugas berusaha memberikan layanan yang cepat dan adil, meskipun masih ada tantangan dalam waktu penyelesaian dokumen. Upaya ini mencerminkan prinsip responsivitas dari UNDP. Namun, keterbatasan fasilitas fisik untuk kelompok rentan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar semua warga dapat berpartisipasi secara penuh. Secara keseluruhan, tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Pangkalan Kasai masih memerlukan pengembangan untuk sepenuhnya sejalan dengan teori (UNDP, 1997).

Tabel V.4
Matrix hasil penelitian

NO	Indikator	Hasil
1	Transparansi	Belum optimal dikarenakan Sosialisasi prosedur kepada masyarakat tidak memadai. Minimnya akses informasi resmi (seperti papan pengumuman dan brosur) mengakibatkan banyak warga yang tidak mengetahui syarat dan proses yang

		diperlukan.
2	Akuntabilitas	Belum terlaksana di karenakan Waktu penyelesaian dokumen sering tidak tercapai, dan kedisiplinan petugas kurang. Sistem pelaporan pengaduan bersifat informal, mengurangi transparansi dan akuntabilitas.
3	Resposivitas	Sudah terlaksana dikarenakan Petugas menunjukkan sikap ramah dan empatik, serta berusaha memberikan pelayanan yang cepat dan responsif
4	Efektif dan efisien	Sudah terlaksana dikarenakan Proses pelayanan mengikuti prosedur dan biaya administrasi dikelola secara efisien.
5	Kesetaraan dan inklusivitas	Sudah terlaksana dikarenakan Semua warga dilayani tanpa diskriminasi, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

Sumber : Data hasil olahan peneliti, 2025

Serta Faktor pendukung dan Penghambat nya adalah, Serta faktor pendukung dan penghambat nya beberapa indikator tidak dapat terlaksana dengan optimal yaitu Faktor pendukung utama adalah kesadaran petugas yang tinggi dalam memberikan pelayanan cepat dan ramah kepada masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kewenangan sebagai kelurahan yang tidak bisa membuat aturan sendiri, anggaran terbatas untuk wilayah yang luas dan padat penduduk, serta keterbatasan SDM dengan banyak petugas yang sudah berusia lanjut dan sarana dan prasarana yang masih kurang.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Andry & Tarmizi. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Marpoyan tujuh.

Dwiyanto Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik* (Cetakan Ke). UGM university Press.

Elia, A., & Dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif*. Pustaka Ilmu Group.

Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Yayasan Prima Agus Teknik Redaksi. Krisnandy, H. (2019). *Pengantar Manajemen*. LPU-UNAS. Muhammad. (2019). *Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press.

Nurman, A. S. & S. (2023). *Teori Administrative:administrative executive*. CV.BUDI UTAMA DEEPUBLISH.

Beni Faturrahman dan Raden Imam Al Hafis

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025

320

- Riantika. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pe, Issue March). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sondang.P.Siagian. (1992). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta. Stephen P.Robbins. (2002). *Manajemen*. Gramedia.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. AlHandrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi*

Publik), 9(2), 143-154.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.

- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban

dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.

- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318).

Atlantis Press.

- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL*

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Dr. Iwan Satibi, Ms. (2012). Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik. Unpas Press, 22–25. Diambil dari <http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/480>
- Dunn, W. N. (2000). pengantar analisis kebijakan. yogyakarta: gadjah mada university press.
- Dye, T. R. (1978). understanding public policy. Englewood cliffs. NJ: prentice-hall, inc.
- Ellitan, L. dan L. A. (2009). manajemen inovasi transformasi menuju organisasi kelas dunia. bandung: alfabeta.
- Epa, N., Lukman, S., & Wargadinata, E. (2020). Dalam penerapan, 11(4).
- Friedrickson dan Hart. (2003). kebijakan publik dan reformasi. jakarta: sinar harapan.
- Gertson, L. N. (2002). public policy making in a democratic society. armonk: M.E Sharpe.
- Halvorsen, T. et al. (2005). on the differences between public and private sector innovations. oslo: Publin report.
- Handrian, E. (2023). buku ajar kebijakan publik. pekanbaru: UIR Press.